Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Jusuf Kalla

Ardillah Abu^{1*}, Ismail Suardi Wekke², Sabil Mokodenseho³

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Email: ardillah_abu@iainpalu.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Email: iswekke@gmail.com

³Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: sabil.mokodenseho@gmail.com

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Muhammad Jusuf Kalla, Moderasi Beragama, Persaudaraan, Keadilan

*Correspondence Address:

xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

Abstract: Moderasi beragama sangat penting dalam rangka membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang agamanya beragam, termasuk Indonesia. Menggaungkan moderasi beragama adalah tugas seluruh masyarakat beragama termasuk para tokoh bangsa yang menjadi panutan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menghadirkan pandangan Muhammad Jusuf Kalla terkait moderasi beragama. Melalui metode kepustakaan, penelitian ini menemukan konflik bernuansa agama terjadi, selain karena perbedaan ideologi, juga disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi, sosial, hukum dan politik. Untuk mengantisipasi konflik yang bernuansa agama tersebut, Muhammad Jusuf Kalla sangat menekankan pentingnya moderasi beragama untuk dijalankan. Sebagai tokoh yang intens menyuarakan moderasi beragama, Muhammad Jusuf Kalla mengatakan moderasi beragama harus dimulai dengan rasa persaudaraan, baik persaudaraan antara umat beragama, persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara, serta persaudaraan antar sesama manusia.

PENDAHULUAN

Anugerah terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain adalah keragaman agama, ras, etnis, suku, bahasa dan stratafikasi sosial (Birnie-Smith, 2020; Meyer & Waskitho, 2020; Wekke & Mokodenseho, 2017). Keberagaman tersebut seharusnya adalah dapat menjadi sumber kekuatan, namun dapat juga menjadi ancaman, tantangan dan benturan, serta sumber konflik yang erat kaitannya dengan sikap atau cara pandang seseorang yang “anti keberagaman” (Damanik, 2020; Mokodenseho & Wekke, 2017). Cara pandang ekstrimisme terkait ajaran agama yang dianut menjadi tantangan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam (Hadi, 2020), namun di sisi lain terdapat berbagai agama dan etnis yang sejak dahulu hidup saling

berdampingan dengan damai sebagai satu kesatuan yang dibingkai dalam pandangan hidup kebhinekaan sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 (Iwamony, 2020; Setiadi, 2020; Wekke, Mokodenseho, & Firdaus, 2017).

Berbagai tantangan umat Islam di Indonesia dari pandangan yang anti keberagaman yaitu adanya sebagian dari kelompok Islam berpandangan ekstrem dan ketat menafsirkan teks-teks keagamaan dan memaksakan pandangan tersebut dikalangan umat Muslim (Sirozi, 2020; Komariah, 2020; Muthuswamy, 2020; Ramzy, 2020). Gerakan kelompok ekstrem semakin massif dan telah menggunakan media sosial sebagai basis gerakannya (Gaudette, Scrivens, & Venkatesh, 2020; Susanto, Loisa, & Junaidi, 2020; Winter, Neumann,

Meleagrou-Hitchens, Ranstorp, Vidino, & Fürst, 2020). Kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain (Yustisia, Putra, Kavanagh, Whitehouse, & Rufaedah, 2020; Lahmar, 2020; Sayers, 2020).

Kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya yang multikultural, khususnya keragaman beragama semakin dibutuhkan masyarakat sebagai kontekstualisasi dari pemahaman moderasi beragama menjadi jawaban alternatif dari berbagai pandangan dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan atas nama kebenaran agama sehingga dapat menimbulkan konflik dan pertumpahan darah atas nama agama seperti terjadi di berbagai negara Islam termasuk Indonesia.

Kondisi bangsa sebagaimana di atas, melatarbelakangi Muhammad Jusuf Kalla untuk melakukan berbagai penyadaran terkait arti penting pemahaman moderasi untuk digaungkan dan diaplikasikan dalam tindakan. Dengan melalui gagasan serta pandangan moderasi beragama Muhammad Jusuf Kalla yang tertuang berbagai pidato, hasil wawancara dengan media, serta pengalamannya dalam mendamaikan berbagai peristiwa konflik atas nama agama yang terjadi di Indonesia, seperti konflik poso, dan ambon.

Pandangan Muhammad Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa sangat relevan terkait moderasi beragama dengan tujuan memberikan pandangan kepada umat bahwa moderasi pada dasarnya adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang seimbang, toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini bertujuan mengimbangi arus deras sejumlah pandangan tokoh agama yang ekstrim dan radikal sehingga berefek pada

kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda dengan pemahamannya.

Kajian tentang tokoh Muhammad Jusuf Kalla telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Liddle (2005) misalnya, mencoba memfokuskan perhatiannya pada tahun pertama kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang saat itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presidennya. Penelitian Liddle cukup menarik dalam rangka memotret kepemimpinan politik Muhammad Jusuf Kalla, namun kurang dalam melihat bagaimana konsep moderasi beragama yang ditawarkan sang tokoh. Meskipun Liddle hanya memfokuskan penelitiannya pada kepemimpinan politik Muhammad Jusuf Kalla, namun pandangannya terkait moderasi beragama menurut penulis penting dihadirkan dalam kerangka berbangsa dan bernegara, mengingat selain beragam suku, bahasa dan adat istiadat, Indonesia juga menganut beberapa agama yang itu sangat memungkinkan terjadinya konflik, baik itu konflik diinternal agama yang satu maupun antara satu agama dengan agama yang lain. Liddle menyimpulkan bahwa kemajuan paling terlihat dalam organisasi basis kekuatan politik pemerintah saat itu adalah tanggapan kebijakan terhadap tsunami, pembentukan perjanjian damai Aceh, dan tindakan terhadap pejabat yang korup. Sementara pembuatan kebijakan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan subsidi bahan bakar, kurang berhasil dibandingkan dengan Orde Baru yang mempertahankan tingkat pertumbuhan yang kuat selama hampir tiga dekade.

Sementara Sari (2018) lewat risetnya mencoba melihat bagaimana berita mingguan *Majalah Gatra* membongkar berita terkait tiga tahun pemerintahan Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Joko Widodo sebagai presidennya, dalam sudut pandang politik

dan penegakan hukum untuk mengetahui keberpihakan *Majalah Gatra* dalam memberitakannya. Penelitian Sari menggunakan teknik analisis *framing model* Robert Entman dengan empat perangkat unit analisis, *define problem, diagnose cause, make moral judgement, treatment recommendation*. Sementara berita yang menjadi objek penelitian Sari adalah laporan utama edisi khusus tiga tahun pemerintahan Jusuf Kalla dan Joko Widodo terkait bidang politik dan penegakan hukum yang terbit pada tanggal 19-25 Oktober 2017, yang berjumlah empat berita. Temuan Sari (2018) menunjukkan bahwa *Majalah Gatra* dalam membingkai berita cenderung subjektif dan memihak kepada pemerintah. Hal ini tampak pada narasi pemberitaan, *visual image*, dan penyajian hasil evaluasi lembaga survey, serta pemilihan narasumber yang kurang berimbang antara *plus-minus* evaluasi kinerja pemerintah terkait isu kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional.

Temuan Sari di atas, dapat dijadikan data membantu penelitian ini dalam rangka melihat sosok Muhammad Jusuf Kalla, baik ia sebagai seorang tokoh politik maupun sebagai seorang individu yang memberikan teladan kepada masyarakat beragama, khususnya Indonesia dalam kaitannya dengan moderasi beragama.

Kita mengetahui bersama bahwa Muhammad Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh Indonesia yang intens menyuarakan pandangannya terkait moderasi beragama dan bagaimana seharusnya mengimplementasikan sikap moderasi beragama tersebut dalam mencegah konflik bernuansa agama di Indonesia. Untuk memecahkan persoalan tersebut maka tulisan ini bermaksud ingin melihat dan menghadirkan beberapa pandangan Muhammad Jusuf Kalla terkait moderasi beragama, khususnya di Indonesia dengan harapan bisa menjadi referensi dalam

pengembangan terkait topik moderasi beragama sebagai solusi dari konflik yang bernuansa agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti berhadapan langsung dengan teks atau naskah. Peneliti kemudian melakukan pencarian data dari berbagai sumber primer maupun sekunder, yang relevan dengan tema penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif, kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Jusuf Kalla

Muhammad Jusuf Kalla atau yang akrab disapa dengan sebutan JK, lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara. Muhammad Jusuf Kalla terlahir dari pasangan H. Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha bernama *Kalla Groups*. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri.

Muhammad Jusuf Kalla mengawali karir politiknya pada tahun 1960-an, ketika ia menjabat sebagai ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan periode 1960-1964. Karirnya berlanjut ketika terpilih menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di tahun 1965-1966. Kemudian pada tahun 1967-1969, ia menjadi terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin, dan berlanjut hingga menjadi Ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1967-1969.

Di tahun 1965, setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), Muhammad Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara

(1965-1968). Di saat yang sama, ketika ia sedang menyelesaikan tugas akhir, Muhammad Jusuf Kalla terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (periode 1965-1968). Karirnya semakin melambung naik ketika terpilih menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar, dan tahun 1997-1999 mewakili daerah.

Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum partai Golkar di tahun 2004, Muhammad Jusuf Kalla juga sempat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tetapi karirnya di sini hanya bertahan selama 6 bulan masa jabatan. Ketika masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Muhammad Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menko Kesra), tetapi kemudian ia memutuskan untuk mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Aspinall, 2005: 19). Kemenangan telak pada pemilihan umum tahun 2004, mengantarkan Muhammad Jusuf Kalla menuju istana negara untuk disahkan sebagai wakil presiden periode 2004-2009 mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Aspinall, 2005). Mereka berdua adalah pasangan presiden dan wakil presiden dari hasil pemilihan umum pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2009, Muhammad Jusuf Kalla maju sebagai kandidat calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar dengan di damping oleh Wiranto sebagai wakilnya dari Partai Hanura. Namun pasangan ini kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (petahana) dan H. Boediono yang kemudian keduanya menjadi presiden dan wakil presiden

periode 2009-2014. Pada September 2011, Muhammad Jusuf Kalla mendapatkan gelar kehormatan sebagai “Doctor Honoris Causa” yang keempat dari Universitas Hasanuddin Makassar dalam bidang ekonomi dan politik. Ia juga berpesan bahwa tidak perlu memberikan jualan politik seperti janji-janji politik, yang harus dilakukan adalah berpikir bagaimana caranya agar rakyat bisa hidup sejahtera dan menerima keadilan. Karena menurutnya, seorang pemimpin yang hanya membina kemakmuran tanpa melihat pemerataan merupakan masalah besar. Jika susah, maka harus susah bersama, dan jika maju dan sejahtera, juga harus bersama-sama.

Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 2009, Muhammad Jusuf Kalla kemudian menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2009-2014 (Alexandra, 2017). Untuk yang kedua kalinya, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden. Tepat pada 20 Oktober 2014, mereka berdua dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 (Todo & Budiarta, 2018).

Ada beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Muhammad Jusuf Kalla, di antaranya: Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Doktor HC bidang perdamaian dari Universitas Syah Kuala Aceh pada 12 September 2011, Doktor HC bidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya Malang pada 8 Oktober 2011, Doktor HC bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013, Penghargaan Budaya Akademik Islami (BudAI) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Penghargaan sebagai Tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk perdamaian di Maluku, Ambon 2011, Penghargaan Dwidjosowojo Award

dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, *The Most Inspiring Person*.

Ketika terjadi kerusuhan di Ambon, Muhammad Jusuf Kalla tampil sebagai juru damai melalui pertemuan Malino I dan II, begitu juga ketika kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah (saat itu ia masih menjabat sebagai Menko Kesra RI dalam Kabinet Gotong Royong). Ketika menjabat sebagai wakil presiden RI, ia datang membawa kedamaian di Aceh dengan mempertemukan pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia (Smith, 2018: xi; Schulze, 2007; Liddle, 2005). Ketika menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla memang memiliki sejarah yang panjang dalam dunia usaha dan politik, serta didukung dengan pengalaman organisasi yang begitu banyak. Ia memang sosok yang aktif sejak duduk di bangku sekolah, tidak heran sosok Muhammad Jusuf Kalla begitu kontroversial sebab ia hidup di dalam ranah organisasi dan politik yang membuatnya harus tegas dan bisa mengambil keputusan secara cepat.

Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia

Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengenal ajaran moderasi beragama. Dalam Islam terdapat konsep *washatiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang), (Arafah, 2020).

Sementara dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama (Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, 2019). Sementara dalam gereja Katolik,

dikenal dengan istilah “terbuka” terhadap “fundamentalis” dan “tradisionalis” (yang menolak pembaruan dalam pengertian gereja Katolik) (Notermans, Samson, & Jansen, 2011; Momen, 1992).

Moderasi juga dikenal dalam tradisi Hindu. berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia (Susanti, 2020). Sementara dalam agama Buddha, esensi ajaran moderasi beragama dapat dilihat dari Pencerahan Sang Buddha yang berasal dari Sidharta Gautama ((Juwono, 2016). Pada saat Pangeran Sidharta meninggalkan kehidupan duniawi, ia telah mengikrarkan Empat Prasetya yang berdasarkan Cinta Kasih dan Kasih Sayang yang tidak terbatas, yaitu berusaha menolong semua makhluk; menolak semua keinginan nafsu keduniawian; mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma; berusaha mencapai Pencerahan Sempurna (Sastrahidayat, 2012: 5).

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *Yin Yang*, karena *Yin Yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam *Dao*. *Yin Yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem (Nyitray, 2010).

Dengan demikian, pada dasarnya semua agama, khususnya yang ada di Indonesia memiliki pandangan yang sama terkait moderasi beragama, yakni proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang atau yang tidak diajarkan didalam agama (Kareem & Youssef, 2020; Halik, 2020). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang budayanya cukup beragam, sikap keberagamaan yang eksklusif, yang hanya mengakui keselamatan dan kebenaran

secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar agama. Umumnya, sejumlah konflik keagamaan yang terjadi dipicu oleh adanya sikap keberagamaan yang eksklusif (Komariah, (2020), serta kontestasi antar kelompok agama dalam merebut dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran dan bijaksana.

Konflik keagamaan terjadi hanya karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Salah satu konflik yang ada tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu, dimana konflik ketidakharmonisan masyarakat berasal. Misalnya, dari kelompok komunisme (ekstrim kiri) dan Islamisme (ekstrim kanan) (Mahoney, 2020). Namun dewasa ini, ancaman ketidakharmonisan masyarakat dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme. van Bruinessen (2002) mencontohkan Darul Islam, yang menginspirasi persemaian ideologi Islamis—berhaluan menentang negara. Sementara di tengah kesenjangan ekonomi dan instabilitas politik negara, Islamisme muncul menjadi ideologi alternatif sebagai jalan keluar atas berbagai persoalan (O'Neill, 2002). Hadiz, 2010). Rabasa (2003) dan Barber (2001) menilai globalisasi berimplikasi pada penyebaran Islamisme karena bukan saja mengancam nilai-nilai tradisional masyarakat tetapi juga memperkecil jarak spasial maupun temporal antar negara. Hal tersebut juga diperparah dengan kebijakan politik luar negeri negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang dinilai merugikan umat Muslim (Bergen, 2001).

Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari ketidakharmonisan perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat dan inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia (Sahid,

Jihadi, & Gunardi, 2019). Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan, melainkan berusaha mencari penyelesaian dengan toleran (Arifinsyah, Andy, & Damanik, 2020; Ma'arif, 2019). Kemudian, dalam beragama, memahami teks agama dewasa ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem, yang satu terlalu mendewakan teks (Ingram, Whiteside, & Winter, 2020) tanpa mempertimbangkan kemampuan akal, atau dengan kata lain, kitab suci dipahami lalu diamalkan tanpa memahami konteksnya. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif (Sebastian, Hasyim, & Arifianto, 2020).; Ravenscroft, 2019). Sebaliknya, yang kerap disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal sehingga mengabaikan teks itu sendiri (Evans, 2019). Dalam konteks tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya.

Pada intinya, moderasi harus dipahami dan dikelola sebagai sebuah komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, budaya, etnis, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara sesama. Jelas bahwa moderasi beragama erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dan memiliki sikap tenggang rasa sebagai warisan leluhur yang mengajarkan saling memahami satu sama lain yang berbeda (Kawangung, 2019).

Ajakan dan seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan menjadi tugas kita bersama, termasuk tokoh agama dan pemerintah, sehingga tidak sampai menimbulkan

peristiwa hingga memakan korban, serta dibutuhkan berbagai macam upaya serta referensi pencegahan untuk penyelesaian konflik. Resolusi konflik sesuatu yang penting, karena konflik adalah ancaman serius bagi rusaknya suatu negara, sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah.

Pandangan Muhammad Jusuf Kalla terkait Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah bagaimana menjalin hubungan yang seimbang antar pemeluk agama sehingga terjadi rasa toleransi dan saling menghargai, yang mampu menghadapi perbedaan. Moderasi pada kenyataannya adalah bagaimana melakukan prinsip-prinsip yang seimbang dan saling menghargai satu sama lain.

Jusuf Kalla mengatakan dalam banyak pertemuan bahwa pemikiran moderasi (*wasathiyah*) berpangkal pada sejarah Islam Indonesia yang datang dengan damai. Islam Indonesia adalah Islam jalan tengah dan moderat, yang memiliki ciri-ciri pergaulan hidup yang baik, berbeda dengan Islam di Timur Tengah, hampir semua negeri seperti Irak, Yaman, dan Suriah terjadi pertikaian dan konflik. Islam di Indonesia dan Islam di Timur Tengah pada dasarnya sama, tetapi gaya hidup dan pergaulan masyarakat Muslim Indonesia lebih kepada suatu cara yang dapat hidup bersama, berdampingan antara sesama agama (Islam) maupun dengan agama lain.

Muhammad Jusuf Kalla dalam buku karangan Sirajuddin dan Dahlan (2018:x) mengatakan bahwa konflik yang membuat Timur Tengah dan beberapa negara mundur puluhan tahun, bahkan melahirkan kelompok destruktif seperti *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), yang telah memporakporandakan stabilitas politik dan keamanan kawasan biasanya bersumber dari konflik ketidakadilan, lalu menjadi radikal dengan masuknya isu agama.

Indonesia, meskipun tidak separah dibandingkan negara lain, juga menjadi perhatian dari Muhammad Jusuf Kalla. Ia mengatkan Indonesia memiliki banyak pengalaman konflik dalam perjalanan kemerdekaannya. Bahkan, konflik terakhir beberapa tahun yang lalu di Aceh telah menyebabkan 10 ribu orang meninggal dunia. Dari 15 konflik, 10 di antaranya karena ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik. Sisanya karena persoalan ideologi dan separatisme.

Untuk menghindari segala macam konflik yang terjadi, dan meminimalisir perbedaan di antara masyarakat, khususnya Indonesia yang berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Maka sangat penting untuk menjaga hubungan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama. Menjaga hubungan yang baik dalam beragama adalah tugas kita semua, yang salah satunya lewat moderasi beragama.

Jusuf Kalla mengatakan moderasi beragama harus dimulai dengan rasa persaudaraan sebagai umat beragama, yang dalam Islam dikenal dengan *ukhuwah islamiyah*—persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan tanpa membedakan golongan (Alama, 2020). Sesama akidah adalah saudara, harus kita jalin dan jaga tali persaudaraan dengan sebaik-baiknya.

Sesama umat Islam pada dasarnya adalah saudara, dan wajib menjalin terus persaudaraan di antara sesamanya. Jusuf Kalla mengajak sesama umat Islam dengan mengatakan marilah yang saudara kita jadikan saudara dan janganlah saudara kita anggap sebagai musuh karena masalah kecil dan tidak berarti. Sebab, jika kita lakukan hal tersebut, hanya akan membuat permusuhan yang dapat mengancam *ukhuwah islamiyah* yang melumpuhkan kerukunan dan keutuhan bangsa”.

Setelah terbentuk rasa persaudaraan di antara sesama umat beragama,

kemudian *ukhuwah wathaniyah*—persaudaraan sebagai bangsa yang diikat oleh jiwa nasionalisme/kebangsaan tanpa membedakan agama, suku, ras, warna kulit, adat istiadat, dan budaya (Nur, 2020). Semuanya itu adalah saudara yang perlu untuk dijalin, karena kita sama-sama satu bangsa yaitu Indonesia.

Terakhir adalah *ukhuwah insaniyah*—persaudaraan di antara sesama manusia secara universal tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya (Mukhibat, 2020). Hubungan persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan dimaksudkan agar tiap-tiap manusia dapat memanusiakan manusia dan memosisikan diri atau melihat orang lain dengan penuh rasa kasih sayang. *Ukhuwah insaniyah* harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sekalipun Allah memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya. Untuk itu, jika *ukhuwah insaniyah* tidak dilandasi dengan ajaran agama (keimanan dan ketakwaan), maka yang akan muncul adalah jiwa kebinatangan yang penuh keserakahan, bahkan memunculkan konflik di antara sesama manusia.

Sebagai seorang Muslim, harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan ketiga macam *ukhuwah* tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apabila ketiganya terjadi secara bersamaan, maka yang harus diprioritaskan adalah *ukhuwah Islamiyah*, karena *ukhuwah* ini menyangkut kehidupan dunia dan akhirat.

Memilih dan mengambil jalan moderasi pada dasarnya merupakan usaha menggali semangat Islam. Inilah yang dimaksudkan Muhammad Jusuf Kalla, yakni berusaha menggali semangat keislaman, tidak hanya makna lahiriahnya semata sebagaimana hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW., janganlah

diartikan sebagai usaha menghindari dari kondisi jahiliyah, tetapi hal itu bertujuan untuk mengusahakan dan berbuat yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, Yusuf Kalla dalam Abdullah dan Bella (2016:271) mengatakan “kita juga kadang seperti itu, bagaimana meninggalkan sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik, serta meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi menjadi hal-hal yang bermanfaat kepada semuanya”.

Sementara dalam tataran empiris-aplikatif, Muhammad Jusuf Kalla (2017) mengatakan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memerhatikan semua hal yang menjadi tantangan dan peluang demi kemajuan bangsa dan negara, serta mampu memosisikan diri secara baik dalam persaingan global yang sangat kompetitif. Jusuf Kalla juga sangat menekankan perlunya menempu jalan tengah dalam menyelesaikan masalah bangsa dan membangun bangsa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik bernuansa agama terjadi, selain karena perbedaan ideologi, juga disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi, sosial, hukum dan politik. Untuk mengantisipasi konflik yang bernuansa agama tersebut, Muhammad Jusuf Kalla sangat menekankan pentingnya moderasi beragama untuk dijalankan. Menurutnya, moderasi beragama harus dimulai dengan rasa persaudaraan, baik persaudaraan antara umat beragama, persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara, serta persaudaraan antar sesama manusia secara universal tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya.

REFERENSI

Abdullah, H. & Bella, B. (eds). (2016) *74 Kumpulan Pidato Pilihan Muhammad Jusuf Kalla 2014-2015: Satu Digit*. Jakarta: Buku Republika.

- Alama, M. (2020). A Collaborative Action in the Implementation of Moderate Islamic Education to Counter Radicalism. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 11(7), 497-516.
- Alexandra, L. A. (2017). Offering support and sharing experiences: Indonesia's approach to peacebuilding. In *Rising powers and peacebuilding*, (39-68). Palgrave Macmillan, Cham.
- Arafah, S. (2020). Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural). *MIMIKRI*, 6(1), 58-73.
- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 91-108.
- Aspinall, E. (2005). Politics: Indonesia's year of elections and the end of the political transition. *The politics and economics of Indonesia's natural resources*, 13-52.
- Aspinall, E. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *South East Asia Research*, 13(2), 117-156.
- Barber, B. R. (2001). *Jihad vs. McWorld. Terrorism's Challenge to Democracy*. New York: Ballentine Books.
- Bergen, P. L. (2001). *Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama Bin Laden*. New York: The Free Press.
- Damanik, E. L. (2020). Ethnicity Situation and Intolerant Attitudes in Multicultural Societies in the Medan City. *Jurnal Humaniora*, 32(1), 39-50.
- Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. (2019). *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Evans, M. (2019). Secular liberals, religious nationalists, and ultra-orthodox parties. *Coalition Government as a Reflection of a Nation's Politics and Society: A Comparative Study of Parliamentary Parties and Cabinets in 12 Countries*.
- Gaudette, T., Scrivens, R., & Venkatesh, V. (2020). The Role of the Internet in Facilitating Violent Extremism: Insights from Former Right-Wing Extremists. *Terrorism and Political Violence*, 1-18.
- Hadi, A. T. (2020). Multicultural Education: An Effort To Prevent Religious Radicalism In Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 3589-3604.
- Hadiz, V. R. (2010). Political Islam in post-authoritarian Indonesia. *Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), University of Oxford, Working Paperno*, 74.
- Halik, A. (2020). Moderation and Mainstream of Pesantren or Madrasah Education. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 14-37.
- Ingram, H. J., Whiteside, C., & Winter, C. (2020). *The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic State Movement*. Oxford University Press, USA.
- Iwamony, R. (2020). Coping with religious-based segregation and discrimination: Efforts in an Indonesian context. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 76(4), 8.
- Juwono, F. A. (2016). Makna Pencerahan dalam Zen Buddhisme. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 14(27), 1-10.
- Kalla, M. J. (2017). Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

- Masyarakat. *Sambutan Wakil Presiden RI (M. Jusuf Kalla) Pada Saat Menghadiri Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2017 di Jakarta*.
- Kareem, A. P. D. A. S., & Youssef, O. T. (2020). Moderate religious discourse and its impact on countering extremism. *Journal Of Historical & Cultural Studies an academic magazin*, 12(2/44).
- Kawangung, Y. (2019). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. *International journal of social sciences and humanities*, 3(1), 160-170.
- Komariah, S. (2020). Radicalization: The Misconception of Religious Practices in Diversity. *The Journal of Society and Media*, 4(1), 49-65.
- Lahmar, F. (2020). Islamic Education: An Islamic "Wisdom-Based Cultural Environment" in a Western Context. *Religions*, 11(8), 409.
- Liddle, R. W. (2005). Year one of the Yudhoyono–Kalla duumvirate. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(3), 325-340.
- Ma'arif, S. (2019). Reinventing pesantren's moderation culture to build a democratic society in the post-reform Republic of Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(3), 1739-1751.
- Mahoney, D. J. (2020). Reflections on the counter-revolution in France: Part II: Confronting communism, Islam and Western self-hatred. *Quadrant*, 64(7/8), 77.
- Mokodenseho, S., & Wekke, I. S. (2017). Toleransi Beragama dan Pembelajaran Agama Islam. *Prosiding*, 1(1), 67-75.
- Momen, M. (1992). Fundamentalism and Liberalism: towards an Understanding of the Dichotomy. *Baha'I studies review*, 2(1).
- Muhammad Sirozi, Y. (2020). Preventing Religious Radicalism on College Student in the Islamic State Higher Education (PTKIN) Case Study of Islamic State University (UIN) in Indonesia. *PalArch's Journal of ArchaeologyEgypt/Egyptology*, 17(6), 7062-7084.
- Mukhibat, M. (2020). Virtual Pesantren Management in Indonesia: In Knowing Locality, Nationality, and Globality. *Dinamika Ilmu: Jurnal of Education*, 20(1), 123-132.
- Muthuswamy, M. S. (2020). Explaining Religion-Invoking Terrorism: The Importance of a Well-Specified Theory in Designing and Interpreting Surveys. *Available at SSRN 3661012*.
- Notermans, C., Samson, J., & Jansen, W. (2011). "The Gender Agenda": New Strategies in Catholic Fundamentalist Framing of Non-Heterosexuality in Europe. *Journal of Religion in Europe*, 4(2), 273-299.
- Nur, M. J. (2020, May). Da'wah in Form of Ukhuwah Islamiyah. In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences 2019*. Atlantis Press, 941-946.
- Nyitray, V. L. (2010). Confusion, elision, and erasure: feminism, religion, and Chinese Confucian traditions. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 26(1), 143-160.
- O'Neill, W. (2002). Conference Report, in *Responding to Terrorism: What Role for the United Nations?*, International Peace Academy, New York, 25–26.
- Rabasa, A. (2003). *Political Islam in Southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists*. Oxford: OUP.
- Ramzy, M. I. (2020). Universal Aspects of Islamic Religious Ethics and Muslim Extremism. *Journal of Dharma*, 45(3), 437-452.

- Ravenscroft, I. (2019). Terrorism, religion and self-control: An unexpected connection between conservative religious commitment and terrorist efficacy. *Terrorism and Political Violence*, 1-16.
- Sahid, M. M., Jihadi, A. N., & Gunardi, S. (2019). Moderate Islam As A Solution To Pluralism In The Islamic World: The Experience Of Indonesia. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 1-24.
- Sari, D. P. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Majalah Gatra. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 202-215.
- Sastrahidayat, I. R. (2012). *Sang profesor mencari Tuhan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sayers, S. (2020). Marx and Progress. *International Critical Thought*, 10(1), 18-33.
- Schulze, K. E. (2007). *Mission not so impossible: the Aceh monitoring mission and lessons learned for the eu*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Sebastian, L. C., Hasyim, S., & Arifianto, A. R. (2020). Conservative Islam and the dilemma of Indonesian democracy. *Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics*, 210.
- Sirajuddin, S., & Dahlan, M. (2018). *Muhammad Yusuf Kalla: Membangun Visi Perdamaian Agama dan Kemakmuran Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, C. (2018). *Resilience and the localisation of trauma in Aceh, Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Susanti, K. D. (2020). Ajaran Susila Hindu dalam Membangun Karakter dan Moralitas. *Haridracarya*. 1(1), 92-100.
- Susanto, E. H., Loisa, R., & Junaidi, A. (2020). Cyber media news coverage on diversity issues in Indonesia. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(4), 510-524.
- Todo, M. F. L., & Budiarta, I. W. (2018). Critical Discourse Analysis on Kompas Daily Newspaper Report on Profiteering Through the Names of President Jokowi and Vice President Jusuf Kalla. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 4(1), 26-37.
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117-154.
- Wekke, I. S., Mokodenseho, S., & Firdaus, F. (2017). Religious education and tolerance: learning process in high school of minority muslim Indonesia.
- Wekke, I. S., & Mokodenseho, S. (2017, September). Religious teaching and learning in minority Muslim of Manado Indonesia. In *2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)*. Atlantis Press.
- Winter, C., Neumann, P., Meleagrou-Hitchens, A., Ranstorp, M., Vidino, L., & Fürst, J. (2020). Online Extremism: Research Trends in Internet Activism, Radicalization, and Counter-Strategies. *International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, 14(2), 1-20.
- Yustisia, W., Putra, I. E., Kavanagh, C., Whitehouse, H., & Rufaedah, A. (2020). The role of religious fundamentalism and tightness-looseness in promoting collective narcissism and extreme group behavior. *Psychology of Religion and Spirituality*, 12(2), 231.